SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 713-723

Analisis Kebijakan Ekonomi pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Debi Almalia Putri[1], Ristiyanas Tasya Fitriani[2], Windi Lestari[3], Ana Fauziya Diyana[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111197@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Sejarah Ekonomi Islam; Dinasti Umayyah; Dinasti Abbasiyah; Kebijakan Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam. Perkembangan sistem ekonomi dalam peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara, perdagangan, serta distribusi kekayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui pengkajian berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan historis dan deskriptif-analitis untuk memahami perkembangan kebijakan ekonomi dalam konteks sosial dan politik pada masa tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah berperan penting dalam memperkuat sistem fiskal melalui pengelolaan baitul mal, penerapan sistem perpajakan seperti kharaj dan jizyah, serta pemanfaatan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Selain itu, pemerintah Umayyah juga melakukan reformasi moneter melalui standarisasi mata uang dinar dan dirham yang mendukung stabilitas perdagangan dan kemandirian ekonomi. Sementara itu, pada masa Dinasti Abbasiyah perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat melalui perluasan jaringan perdagangan internasional, perkembangan sektor pertanian dan industri, serta munculnya pemikiran ekonomi Islam yang lebih sistematis dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada kedua dinasti tidak hanya berperan dalam stabilitas ekonomi negara, tetapi juga menjadi dasar perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa-masa selanjutnya.

Keywords:
Islamic economic history; Umayyad dynasty; Abbasid dynasty; economic

Abstract

This study aims to analyze economic policies during the Umayyad and Abbasid dynasties from the perspective of the history of Islamic economic thought. The development of economic systems in Islamic civilization cannot be separated from the policies implemented by governments in managing state finances, trade, and wealth distribution. This research uses a qualitative method with a library research approach by examining various literature sources such as books, scientific journals, and historical documents related to economic policies during the Umayyad and Abbasid

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 713-723

policy; Islamic economic thought

periods. The analytical approach used is historical and descriptive-analytical to understand the development of economic policies within the socio-political context of the time.The results of the study show that the Umayyad dynasty played an important role in strengthening the fiscal system through the management of baitul mal, the implementation of taxation systems such as kharaj and jizyah, and the use of zakat as an instrument of wealth distribution. In addition, the Umayyad government carried out monetary reforms through the standardization of currency in the form of dinar and dirham, which strengthened trade stability and economic sovereignty. Meanwhile, during the Abbasid dynasty, the economic system developed more rapidly through the expansion of international trade networks, the development of agriculture and industry, and the advancement of intellectual traditions that contributed to the development of Islamic economic thought. These developments show that Islamic economic policies during these two dynasties not only influenced economic stability but also laid the foundation for the evolution of Islamic economic theories in later periods

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, sosial, dan intelektual masyarakat Muslim pada setiap periode. Sejak masa awal Islam hingga berkembangnya berbagai dinasti besar, kebijakan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kajian mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada konsep teoritis, tetapi juga pada bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan oleh pemerintahan Islam dalam praktiknya. Analisis terhadap kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan dinasti-dinasti besar menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam berkembang dan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang nyata.[1]

Salah satu periode penting dalam sejarah ekonomi Islam adalah masa kekuasaan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Kedua dinasti ini memerintah wilayah yang sangat luas dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Dinasti Umayyah yang berkuasa sejak tahun 661 M hingga 750 M dikenal sebagai periode ekspansi wilayah yang sangat pesat, sehingga membutuhkan sistem administrasi dan pengelolaan ekonomi yang terorganisir untuk mengatur pendapatan negara, pajak, dan distribusi sumber daya. Sementara itu, Dinasti Abbasiyah yang berkuasa setelahnya lebih menitikberatkan pada konsolidasi internal, penguatan lembaga pemerintahan, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang turut memengaruhi pemikiran ekonomi Islam.[2]

Pada masa Dinasti Umayyah, kebijakan ekonomi negara mengalami berbagai pembaruan yang bertujuan memperkuat stabilitas fiskal dan administrasi pemerintahan. Pemerintah mulai melakukan reformasi dalam sistem perpajakan, pengelolaan baitul mal, serta pengaturan mata uang untuk mendukung aktivitas perdagangan dan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi di wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Dengan demikian, masa Umayyah menjadi periode penting dalam pembentukan fondasi sistem ekonomi Islam yang lebih terstruktur dalam praktik pemerintahan.[3]

Selanjutnya, pada masa Dinasti Abbasiyah, perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang lebih kompleks seiring dengan kemajuan intelektual dan administrasi pemerintahan. Pada periode ini, berbagai kajian mengenai ekonomi, keuangan negara, dan perpajakan mulai berkembang secara lebih sistematis. Para ulama dan pemikir Muslim mulai menulis karya-karya yang membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pengelolaan pajak, perdagangan, serta distribusi kekayaan dalam masyarakat[4]. Fokus utama kajian ekonomi pada masa Abbasiyah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan sistem perpajakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan ekonomi pada masa Abbasiyah juga didukung oleh berkembangnya jaringan perdagangan internasional, pertanian, serta pengelolaan lembaga keuangan seperti baitul mal. Aktivitas ekonomi yang semakin luas mendorong munculnya

[1] Nurul Fitriani Fatonah and Siti Nurliah, "Sistem Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah," *Jama (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* 2, no. 1 (2025): 1–8.

[2] Ian Rakhmawan Suherli et al., "Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 148–58.

[3] Husnama Patih, "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Dinasti Bani Umayyah," *Journal of Industrial and Syariah Economics* 1, no. 1 (2023).

[4] Mukhtar Lutfi, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 339–64.

pemikiran-pemikiran baru mengenai prinsip keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, serta pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, pengelolaan zakat, serta dukungan terhadap sektor produktif menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.[5]

Dari perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam, kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan adanya proses perkembangan dan penyempurnaan konsep ekonomi Islam. Jika pada masa Umayyah lebih menekankan pada pembentukan sistem administrasi dan fiskal negara, maka pada masa Abbasiyah perkembangan pemikiran ekonomi mulai dipengaruhi oleh kontribusi para ulama dan ilmuwan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak hanya bersifat praktis dalam kebijakan negara, tetapi juga berkembang dalam bentuk pemikiran ilmiah yang menjadi dasar bagi teori ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai analisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep ekonomi Islam berkembang dalam praktik sejarah. Dengan menganalisis kebijakan ekonomi yang diterapkan pada kedua dinasti tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dinamika penerapannya dalam pemerintahan, serta kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan sehingga dapat menjadi landasan teoritis dalam menganalisis perkembangan kebijakan ekonomi Islam pada masa tersebut. Penelitian kepustakaan berfokus pada penelaahan teori, temuan penelitian sebelumnya, serta berbagai literatur yang mendukung pembahasan mengenai konsep dan praktik ekonomi dalam sejarah peradaban Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan deskriptif-analitis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan melihat konteks sosial, politik, dan ekonomi pada periode tersebut. Sementara itu, metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan serta menganalisis kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan ekonomi Islam dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[5] Iman Supratman et al., "Penerapan Ilmu Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah Dalam Masa Kini," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 10, no. 1 (2025).

[6] Fatonah and Nurliah, "Sistem Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah."

1. **Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Baitul Mal pada Masa Dinasti Umayyah**

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah (661–750 M), sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintahan Umayyah merupakan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas hingga Afrika Utara, Persia, dan sebagian wilayah Eropa menuntut adanya kebijakan ekonomi yang kuat agar stabilitas negara dapat terjaga. Oleh karena itu, pemerintah Umayyah mulai memperkuat sistem fiskal negara dengan mengelola berbagai sumber pendapatan negara secara lebih sistematis melalui lembaga keuangan negara yang dikenal dengan baitul mal.[7]

Baitul mal berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang menampung seluruh pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam praktiknya, lembaga ini menjadi pusat administrasi ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan negara kepada masyarakat. Dana yang terkumpul di baitul mal berasal dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), usyur (pajak perdagangan), serta ghanimah dan fai' yang diperoleh dari hasil peperangan. Sistem pengelolaan keuangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Umayyah telah memiliki mekanisme fiskal yang cukup maju untuk ukuran pemerintahan pada masa itu.[8]

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting pada masa Umayyah adalah kharaj atau pajak tanah. Pajak ini dikenakan kepada pemilik atau pengelola tanah sebagai kontribusi terhadap negara berdasarkan tingkat produktivitas lahan tersebut. Kebijakan ini memberikan dampak yang besar terhadap stabilitas ekonomi negara karena sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi utama masyarakat pada masa itu. Dengan adanya sistem kharaj, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang stabil sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap berkembang.[9]

Selain kharaj, pemerintah juga memberlakukan jizyah sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam sebagai bentuk kewajiban finansial sebagai warga negara yang memperoleh perlindungan dari pemerintah. Besarnya jizyah biasanya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sistem ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam kebijakan ekonomi Islam, karena pajak tidak diberlakukan secara seragam tetapi mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain pajak, zakat juga menjadi instrumen ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Dinasti Umayyah. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui zakat, pemerintah dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu seperti fakir, miskin, dan kelompok sosial lainnya yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan

[7] Patih, "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Dinasti Bani Umayyah."

[8] Muh Samsunar, Nasrulla Bin Sapa, and Mukhtar Lutfi, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9, no. 2 (2024): 228–37.

[9] Samsunar, Sapa, and Lutfi.

masyarakat secara keseluruhan. Sistem distribusi zakat yang dikelola melalui baitul mal menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam.[10]

Pengelolaan baitul mal pada masa Dinasti Umayyah juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pembiayaan militer. Infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, dan fasilitas perdagangan dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut, kegiatan perdagangan dan pertanian dapat berkembang lebih pesat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian negara.[11]

Selain itu, pemerintah Umayyah juga berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengatur sistem administrasi pajak dan keuangan negara secara lebih tertib. Pengawasan terhadap pengumpulan pajak dan distribusi dana negara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya sistem administrasi yang lebih terorganisasi, pemerintah dapat mengelola keuangan negara secara lebih efektif.

Salah satu contoh kebijakan ekonomi yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan ekonomi pada masa Umayyah dapat dilihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahannya, distribusi zakat dilakukan secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa pada masa tersebut sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan masyarakat sudah meningkat.[12]

Kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga memperhatikan pengelolaan ekonomi negara secara serius. Melalui sistem fiskal yang terorganisasi, pengelolaan baitul mal, serta penerapan berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, kharaj, dan jizyah, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sistem ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam membangun sistem ekonomi negara yang stabil dan berkeadilan. Pengelolaan baitul mal sebagai lembaga keuangan negara menjadi pusat pengaturan ekonomi yang memastikan bahwa pendapatan negara dapat dikelola secara efektif untuk mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas pemerintahan. Kebijakan ini juga menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang kemudian berkembang lebih luas pada masa Dinasti

[10] Samsunar, Sapa, and Lutfi.

[11] Muhammad Dliyaul Muflihin, "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 58–69.

[12] Siti Hayati, "Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 99–116.

Abbasiyah.

2. Reformasi Moneter dan Administrasi Ekonomi pada Masa Dinasti Umayyah

Selain kebijakan fiskal, Dinasti Umayyah juga melakukan berbagai reformasi dalam bidang moneter dan administrasi ekonomi yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Reformasi ini terutama terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Pada periode tersebut, pemerintah berusaha memperkuat sistem ekonomi negara dengan menciptakan kebijakan yang mampu menyatukan wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kebijakan moneter yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memperlancar aktivitas perdagangan, tetapi juga untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan identitas politik pemerintahan Islam.[13]

Salah satu kebijakan moneter paling penting pada masa Dinasti Umayyah adalah penerbitan mata uang Islam secara resmi. Sebelum kebijakan ini diterapkan, masyarakat di wilayah kekuasaan Islam masih menggunakan mata uang dari Kekaisaran Bizantium dan Persia dalam kegiatan perdagangan. Penggunaan mata uang asing tersebut menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan luar. Oleh karena itu, pemerintah Umayyah memutuskan untuk mencetak mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan ekonomi sekaligus sebagai alat transaksi yang seragam di seluruh wilayah kekuasaan Islam.

Reformasi moneter ini diwujudkan melalui pencetakan dinar emas dan dirham perak yang memiliki ciri khas Islam. Mata uang tersebut mulai dicetak secara resmi sekitar tahun 77 H atau sekitar 697 M pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Koin-koin tersebut tidak lagi menggunakan simbol-simbol dari Bizantium atau Persia, tetapi diganti dengan tulisan Arab dan kalimat tauhid sebagai identitas peradaban Islam. Langkah ini tidak hanya memiliki tujuan ekonomi, tetapi juga memiliki makna politik dan religius karena menunjukkan kemandirian pemerintahan Islam dalam bidang moneter.

Standarisasi mata uang tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas perdagangan. Dengan adanya sistem mata uang yang seragam, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan stabil. Dinar dan dirham yang berbasis logam mulia memiliki nilai intrinsik sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar dalam perdagangan. Sistem ini juga mempermudah hubungan perdagangan antara berbagai wilayah di bawah kekuasaan Islam yang sebelumnya menggunakan sistem mata uang yang berbeda-beda.

Selain berfungsi sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga berperan sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai kekayaan. Nilai mata uang yang berbasis emas dan perak membuatnya relatif stabil dan dipercaya oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mendorong berkembangnya perdagangan internasional yang melibatkan para pedagang dari berbagai wilayah seperti Asia Tengah, Afrika Utara, hingga kawasan Mediterania. Dengan demikian, sistem moneter pada masa Umayyah tidak hanya berperan dalam transaksi domestik tetapi juga memperkuat jaringan perdagangan global dunia Islam.[14]

[13] Muflihin, "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal."

[14] Hendri Tanjung, *Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer* (Elex Media Komputindo, 2020).

Pemerintah Umayyah juga melakukan pembenahan dalam sistem administrasi ekonomi untuk mendukung keberhasilan kebijakan moneter tersebut. Administrasi keuangan negara diatur secara lebih sistematis dengan pembagian tugas yang jelas antara pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan pajak, pengelolaan keuangan negara, dan pengawasan kegiatan ekonomi. Sistem administrasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol arus keuangan negara serta menghindari penyalahgunaan dana publik.[15]

Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai fasilitas ekonomi seperti jalan raya, sistem irigasi, dan pusat perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur tersebut mempermudah distribusi barang dan memperlancar perdagangan antarwilayah. Dengan adanya jaringan transportasi yang lebih baik, perdagangan antara kota-kota besar di wilayah kekuasaan Islam dapat berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan pasar untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Pemerintah berusaha mencegah berbagai praktik kecurangan seperti manipulasi timbangan atau penipuan dalam perdagangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Dengan adanya pengawasan ini, stabilitas pasar dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi meningkat.

Reformasi moneter dan administrasi ekonomi pada masa Dinasti Umayyah juga memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Standarisasi mata uang serta pengelolaan administrasi keuangan negara menjadi fondasi bagi sistem ekonomi yang lebih terorganisasi pada masa-masa berikutnya, termasuk pada masa Dinasti Abbasiyah. Sistem moneter yang berbasis dinar dan dirham bahkan terus digunakan dalam dunia Islam selama berabad-abad dan menjadi salah satu simbol kekuatan ekonomi peradaban Islam.

Dengan demikian, reformasi moneter yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah merupakan langkah penting dalam perkembangan sejarah ekonomi Islam. Kebijakan pencetakan mata uang sendiri, standarisasi sistem moneter, serta pembenahan administrasi ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah Umayyah memiliki perhatian besar terhadap stabilitas ekonomi negara. Reformasi tersebut tidak hanya memperkuat sistem perdagangan dan keuangan negara, tetapi juga menjadi dasar penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode-periode berikutnya.

3. Perkembangan Sistem Ekonomi dan Perdagangan pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mencapai salah satu puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Periode ini sering disebut sebagai masa keemasan karena berbagai sektor kehidupan berkembang secara signifikan, termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Stabilitas pemerintahan serta dukungan kebijakan ekonomi yang kuat membuat aktivitas ekonomi masyarakat berkembang dengan baik. Pemerintah Abbasiyah tidak

[15] Firyal Jilan Nuha et al., "Kebijakan Dan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. April (2025): 57–66.

hanya melanjutkan sistem ekonomi dari masa sebelumnya, tetapi juga melakukan berbagai penyempurnaan dalam pengelolaan ekonomi negara.[16]

Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah adalah berkembangnya perdagangan internasional. Wilayah kekuasaan Islam yang luas serta letak geografis yang strategis menjadikan dunia Islam sebagai penghubung perdagangan antara Timur dan Barat. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang Muslim untuk melakukan aktivitas perdagangan lintas wilayah. Melalui jalur darat dan laut, berbagai komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, logam, dan hasil pertanian diperdagangkan secara luas.[17]

Kota Baghdad yang menjadi ibu kota Dinasti Abbasiyah memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan internasional. Kota ini berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia pada masa itu. Baghdad tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan budaya. Para pedagang dari berbagai wilayah seperti Persia, India, Cina, dan Afrika datang ke Baghdad untuk melakukan transaksi perdagangan, sehingga kota tersebut menjadi pusat pertukaran barang dan budaya antarbangsa.

Selain perdagangan, sektor pertanian juga menjadi salah satu pilar utama perekonomian Dinasti Abbasiyah. Pemerintah melakukan berbagai inovasi dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sistem irigasi yang lebih baik serta penerapan teknik pertanian yang lebih maju. Sistem irigasi ini memungkinkan lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sangat penting karena sektor pertanian menjadi sumber utama kebutuhan pangan masyarakat.

Perkembangan ekonomi pada masa Abbasiyah juga didukung oleh kemajuan dalam sektor industri dan kerajinan. Berbagai jenis industri berkembang pesat, seperti industri tekstil, keramik, logam, dan pembuatan kertas. Industri-industri tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional. Produk-produk dari wilayah kekuasaan Abbasiyah dikenal memiliki kualitas yang tinggi sehingga banyak diminati oleh pedagang dari berbagai wilayah.[18]

Selain itu, pemerintah Abbasiyah juga mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi yang mendukung kegiatan perdagangan dan keuangan. Lembaga seperti baitul mal tetap berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Selain itu, mulai berkembang pula praktik-praktik keuangan seperti kemitraan usaha dan transaksi perdagangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Sistem ini memungkinkan para pedagang untuk melakukan kerja sama bisnis dalam skala yang lebih luas dan terorganisasi.[19]

---

[16] Lutfi, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah."

[17] M A Azzaki, "Kondisi Ekonomi Peradaban Islam Dari Perspektif Kebudayaan Dinasti Abbasiyah," *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024).

[18] Ahmad Gurdachi and Hasan Afabel, "Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750-804 M)," *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 11–23.

[19] Desi Andriani et al., "Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 9–18.

Aktivitas ekonomi yang berkembang pesat juga didukung oleh sistem transportasi dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Abbasiyah membangun berbagai fasilitas seperti jalan perdagangan, pelabuhan, serta pusat-pusat perdagangan yang memudahkan distribusi barang. Infrastruktur ini membantu memperlancar mobilitas barang dan manusia sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lebih efisien. Dengan adanya fasilitas tersebut, perdagangan antarwilayah menjadi semakin aktif dan berkembang.

Kemajuan ekonomi pada masa Abbasiyah juga tidak terlepas dari peran para ulama dan pemikir Muslim yang mulai mengkaji berbagai konsep ekonomi secara lebih sistematis. Pada masa ini muncul berbagai pemikiran mengenai kerja, produksi, distribusi kekayaan, serta aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa pemikir seperti Muhammad bin Hasan As-Syaibani membahas berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa sebagai unsur penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Perkembangan ekonomi yang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah memberikan dampak besar terhadap kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan. Kemakmuran ekonomi memungkinkan berkembangnya berbagai bidang lain seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Banyak lembaga pendidikan dan pusat keilmuan didirikan dengan dukungan ekonomi yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan intelektual dalam peradaban Islam.[20]

Dengan demikian, perkembangan sistem ekonomi dan perdagangan pada masa Dinasti Abbasiyah menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam sejarah ekonomi Islam. Dukungan pemerintah terhadap perdagangan, pertanian, industri, serta pengembangan infrastruktur menjadikan perekonomian berkembang dengan pesat. Kemajuan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadikan dunia Islam sebagai salah satu pusat ekonomi dan peradaban dunia pada masa itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memiliki peran penting dalam perkembangan sistem ekonomi Islam. Pada masa Dinasti Umayyah, kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada penguatan sistem fiskal dan administrasi keuangan negara melalui pengelolaan baitul mal, penerapan berbagai sistem perpajakan seperti kharaj dan jizyah, serta distribusi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Selain itu, reformasi moneter melalui pencetakan dan standarisasi mata uang dinar dan dirham juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan memperlancar aktivitas perdagangan di wilayah kekuasaan Islam yang luas.

Sementara itu, pada masa Dinasti Abbasiyah perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang lebih kompleks dengan didukung oleh pertumbuhan perdagangan internasional, perkembangan sektor pertanian dan industri, serta kemajuan intelektual para ulama dalam merumuskan konsep ekonomi Islam. Kemajuan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadikan

[20] Gurdachi and Afabel, "Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750-804 M)."

dunia Islam sebagai pusat perdagangan dan peradaban pada masa itu. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak hanya terbentuk melalui praktik kebijakan pemerintahan, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran ilmiah yang menjadi dasar bagi perkembangan teori ekonomi Islam pada periode selanjutnya.

REFERENSI

Andriani, Desi, Kamila Alhalimi, Khairul Fadilah, Maisyaro Khalida, and H Herlinda. "Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 9–18.

Azzaki, M A. "Kondisi Ekonomi Peradaban Islam Dari Perspektif Kebudayaan Dinasti Abbasiyah." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024).

Fatonah, Nurul Fitriani, and Siti Nurliah. "Sistem Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah." *Jama (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* 2, no. 1 (2025): 1–8.

Gurdachi, Ahmad, and Hasan Afabel. "Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750-804 M)." *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 11–23.

Hayati, Siti. "Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 99–116.

Jilan Nuha, Firyal, Hikmal Azkia Muharam, Nazmi Ibnu Shina Zein, and Lina Marlina. "Kebijakan Dan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. April (2025): 57–66.

Lutfi, Mukhtar. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 339–64.

Muflihin, Muhammad Dliyaul. "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 58–69.

Patih, Husnama. "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Dinasti Bani Umayyah." *Journal of Industrial and Syariah Economics* 1, no. 1 (2023).

Samsunar, Muh, Nasrulla Bin Sapa, and Mukhtar Lutfi. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9, no. 2 (2024): 228–37.

Suherli, Ian Rakhmawan, Sofian Al-Hakim, Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, and Aip Syarifudin. "Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 148–58.

Supratman, Iman, Maudy Fathia, Aliyyu Aziiza Rochmana, Amelia Nur'aini, and Najla Nur Fauziyah. "Penerapan Ilmu Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah Dalam Masa Kini." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 10, no. 1 (2025).

Tanjung, Hendri. *Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer*. Elex Media Komputindo, 2020.